



**HINDARI DAMPAK SOSIAL, DISARANKAN PROSES HUKUM**

## Rekapitulasi Tingkat Kota 'Dibanjiri' Keberatan

**YOGYA (KR)** - Rapat pleno terbuka dengan agenda rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilwali Yogya tingkat kota berjalan cukup alot. Agenda yang digelar di Kantor KPU Kota Yogya Jalan Magelang Tegalrejo, Rabu (22/2) kemarin pun dibanjiri keberatan kubu saksi dari pasangan Imam-Fadli.

Saat sidang pleno dibuka, saksi utama pasangan Imam-Fadli, Antonius Fokki Ardianto langsung mengajukan berbagai pertanyaan. Mulai dari penjadwalan rekapitulasi suara tingkat kecamatan, jumlah saksi di kecamatan, undangan saksi yang tidak standar hingga dugaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan komunikasi lisan.

Kendati seluruh pertanyaan tersebut sudah dijawab Ketua KPU Kota Yogya Wawan Budiyanto maupun PPK yang bersangkutan, namun belum bisa memuaskan. Hal itu pun menjadi dasar Fokki guna mengisi form keberatan. "Kami mempertanyakan ketidakadilan yang kami rasakan," ungkapnya.

Selama hampir dua jam setelah pleno dibuka pukul 10.00, KPU Kota Yogya baru bisa mengawali rekapitulasi perkecamatan. Untuk merekapitulasi hasil suara di Kecamatan Danurejan yang mendapat giliran pertama pun membutuhkan waktu sekitar empat jam.

Pasalnya, Fokki kembali mempertanyakan berbagai hal yang menyangkut administratif. Mulai tidak dimilikinya dokumen undangan pemilih atau C6 yang sampai ke pemilih, hingga jumlah pemilih tambahan (DPTB) dan pemilih pindah (DPPH) di Mantri-jeron yang datanya tidak dimiliki oleh KPU.

"Karena baik PPS, PPK maupun KPU Kota Yogya tidak memiliki data pasti terkait hal itu, maka saya juga tuangkan dalam kejadian khusus atau keberatan. Apalagi ada ratusan pemilih tambahan tapi datanya tidak tercatat secara resmi," tandasnya.

Ketua DPC PDIP Kota Yogya, Danang Rudyatmoko, yang turut menjadi saksi pendamping mengaku, pihaknya tetap mempersoalkan jumlah surat suara tidak sah dalam ajang Pilwali kali ini. Pasalnya, dalam Pilpres 2014 lalu suara tidak sah hanya mencapai 3.417 suara, sedangkan Pilwali kali ini hingga 14.000 suara.

Oleh karena itu, pihaknya pun mendesak supaya kotak suara tidak sah dapat dibuka guna membuktikan kondisi yang sebenarnya. "Jumlah ini sangat janggal. Kami juga menemukan ada dugaan kecurangan yang terstruktur. Hal ini akan kami jadikan bahan pertimbangan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," paparnya.

Sementara saksi utama pasangan Haryadi-Heroe, Nurcahyo Nugroho, mengatakan pihaknya menghargai setiap proses yang kini tengah berjalan. Perkiraan tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilwali 2017 ini pun patut diapresiasi, lantaran merupakan yang paling tinggi dibanding dua kali pilkada.

Terkait tingginya jumlah surat suara tidak sah, menurut Nurcahyo, merupakan sikap politik pemilih. Sikap politik yang ditunjukkan tersebut bisa dengan mencoblos keduanya atau tidak mencoblos keduanya. "Bisa jadi ada juga yang masuk kategori tidak sah karena ketidaktahuan," tandasnya.

Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto, mengungkapkan permohonan pembukaan kotak suara tidak sah serta merta dapat dikabulkan. Pihaknya perlu memperoleh alasan yang jelas seperti adanya data berbeda yang dimiliki saksi. Selain itu juga mempertimbangkan rekomendasi dari Panwas. Menurutnya, sejauh ini tidak ada perbedaan data serta Panwas belum memberikan rekomendasi.

Wawan mengakui proses rekapitulasi berjalan cukup alot. Hingga petang kemarin baru dua kecamatan yang tengah direkap, yakni Mantri-jeron dan Mergangsan. Kendati masih ada dua belas kecamatan lain, namun ia optimis dapat menyelesaikan tepat waktu. "Kami dibatasi waktu sampai 24 Februari 2017. Sehingga itu akan kami patuhi," tegasnya.

Terpisah, Komisioner Bawaslu RI Nasrullah yang turut hadir memantau rekapitulasi menyarankan, masyarakat yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penempuhan jalur hukum itu pun sudah diatur dan diberikan ruang supaya menghindari dampak sosial.

"Semua harus bersabar menunggu keputusan resmi dari KPU. Kemudian nanti hasil akhirnya jika ada yang tidak sesuai, bawa ke ranah hukum. Biar hukum yang berproses dan tidak berimbas ke sosial," paparnya.

Sementara itu, selama proses rekapitulasi berlangsung, dari pagi hingga sore simpatisan pendukung Imam-Fadli turut mendatangi KPU Kota Yogya. Mereka tetap mengawal supaya berbagai kejang-galan yang dirasakannya dapat diungkap oleh KPU.

(Dhi)-m

Jumpa Pers

Pit. Kepala  
Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005